

Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Mendukung Kualitas Laporan Keuangan Desa Studi Kasus pada Desa Cijujung Kabupaten Bogor

Tasya Maharani Syafitri¹, Etty Gurendrawati², Petrolis Nusa Perdana³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Article Info	ABSTRAK
Article history: Received September 2, 2026 Revised September 2, 2026 Accepted September 2, 2026 Kata Kunci: Aplikasi, Efektivitas, Pengelolaan Keuangan Desa, Penerapan Siskeudes, Siskeudes Keywords: <i>Application, Effectiveness, Siskeudes, Siskeudes Implementation, Village Financial Management</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Cijujung Kabupaten Bogor yang terdiri dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban, seperti yang tercantum dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018. Selain itu penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan indikator efektivitas penerapan Siskeudes dalam pengelolaan laporan keuangan yang terdiri dari indikator produktivitas, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, keunggulan, dan perkembangan. Dan juga untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penggunaan siskeudes dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dari hasil wawancara dan data sekunder bersumber dari pendokumentasian pada siskeudes. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Desa Cijujung Kabupaten Bogor telah mengelola laporan keuangan desa menggunakan Siskeudes dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban seperti yang tercantum dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018. Dan sesuai dengan penerapan atau prinsip dari indikator efektivitas yang terdiri dari produktivitas, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, keunggulan, dan perkembangan. Serta faktor pendukung dalam penelitian ini adalah adanya <i>single entry</i> input yang memudahkan aparat desa dalam menyusun laporan keuangan, sementara faktor penghambat dalam penelitian ini adalah siskeudes yang mengalami <i>upgrade</i> sehingga membuat pekerjaan menjadi tertunda. ABSTRACT <i>This study aims to determine how village financial management is carried out using the Village Financial System (Siskeudes) in Cijujung Village, Bogor Regency, covering the stages from planning to accountability, as stipulated in Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018. In addition, this study also seeks to examine the implementation of effectiveness indicators of Siskeudes in financial report management, which consist of indicators of productivity, quality, efficiency, flexibility, satisfaction, superiority, and development. It also aims to identify the supporting and inhibiting factors in the use of Siskeudes in improving the quality of financial reports. This study uses a qualitative approach with interview and documentation methods. The data used consist of primary data and secondary data obtained from interviews, with secondary data sourced from documentation within Siskeudes. The results of this study conclude that Cijujung Village, Bogor Regency has managed its village financial reports using Siskeudes in</i>

accordance with the stages of village financial management, starting from the planning stage through to accountability. This is also in line with the application of the principles of effectiveness indicators, which include productivity, quality, efficiency, flexibility, satisfaction, excellence, and development. Furthermore, the supporting factor identified in this study is the single entry input feature, which makes it easier for village officials to prepare financial reports, while the inhibiting factor is that Siskeudes underwent an upgrade, which caused delays in the work process.

This is an open access article under the [CC BY](#) license



Corresponding Author:

Tasya Maharani Syafitri
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta
Jakarta, Indonesia
Email: tasyamaharanisyafitri19@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Desa ialah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki banyak potensi untuk dikembangkan [1]. Sehingga pemberian otonomi desa merupakan angin segar bagi perkembangan desa. Pemberian otonomi kepada pemerintah desa juga dapat membantu mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat desa, sehingga dapat menghapus kesenjangan sosial.

Untuk dapat mendukung program tersebut, diperlukan sebuah kerjasama yang solid antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014, sumber-sumber pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dana perimbangan keuangan pusat atau daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota, alokasi anggaran yang berasal dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten atau kota, hibah dan sumbangan yang sifatnya tidak mengikat. Pengalokasian dana dari APBN yang akan diberikan kepada pemerintah desa akan mengalami peningkatan setiap tahun [1]. Thomas Djiwandono mengatakan bahwa terhitung sejak tahun 2015 hingga tahun 2024, jumlah dana desa yang telah berhasil disalurkan oleh pemerintah adalah sebesar Rp608,9 triliun rupiah [2].

Sementara itu, menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014, tentang Desa mendefinisikan keuangan desa sebagai hak dan kewajiban pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut memberikan pengaruh terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan desa yang perlu dilaksanakan dan dikelola dengan baik. Tentu dalam melakukan pengelolaan keuangannya, terdapat risiko terjadinya kesalahan, baik yang bersifat substantif maupun administratif, terlebih banyaknya pihak yang berasumsi bahwa aparat desa belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengelola keuangan tersebut. Selain itu, kemandirian daerah dapat membuka peluang terjadinya korupsi. Hal tersebut didukung oleh data yang diperoleh melalui Indonesia Corruption Watch (ICW), yang menyatakan bahwa pada tahun 2023 tingkat korupsi pada sektor pemerintah desa menduduki peringkat tertinggi yaitu sebanyak 187 kasus korupsi. Tindakan korupsi tersebut dapat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik.

Sebagai lembaga sektor publik, desa memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan. Menurut America Accounting Association (AAA) salah satu tujuan dari penerapan akuntansi pada sektor publik adalah untuk menghasilkan suatu informasi yang berguna bagi pihak manajemen dalam melaporkan pertanggungjawaban atas program kerja yang telah dilaksanakan, atau yang dikenal dengan

istilah akuntabilitas, dimana untuk mencapai akuntabilitas, perlu adanya transparansi dari pemerintah desa. Selanjutnya informasi yang dihasilkan atas penerapan akuntansi tersebut, tertuang dalam laporan keuangan. Dimana laporan keuangan dapat digunakan sebagai acuan dalam mengambil sebuah keputusan.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah bukan hanya sekedar formalitas, namun juga dapat digunakan sebagai sebuah alat yang mengukur kinerja pemerintah. Oleh karena itu, kualitas dari laporan keuangan perlu diperhatikan. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010, disebutkan bahwa terdapat 4 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2015, BPKP bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengembangkan sebuah aplikasi bernama Sistem Keuangan Desa.

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan sebuah sistem yang diciptakan untuk mengatur tata kelola keuangan desa, agar dapat menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas dan bermutu [3]. Sebelum Siskeudes diciptakan, pemerintah desa mencatat laporan keuangannya dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel tanpa memiliki standar tertentu sehingga pemerintah daerah kesulitan dalam mengevaluasi APBDes dan laporan keuangan lainnya. Pengelolaan keuangan desa yang dapat dilakukan melalui siskeudes meliputi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Sebagai salah satu wilayah yang diberikan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahannya, Pemerintah Desa Cijujung memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tersebut, Pemerintah Desa Cijujung wajib untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas terhadap rakyat. Laporan keuangan yang disusun oleh Desa Cijujung disusun menggunakan aplikasi yang disebut dengan Siskeudes sejak tahun 2017.

2. METODE

2.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Menurut Sugiyono [4] lokasi penelitian dapat didefinisikan sebagai tempat dimana suatu peristiwa akan diteliti. Tempat penelitian yang dipilih adalah Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Desa Cijujung sebagai salah satu desa yang mengelola dana yang cukup besar salah satu nya adalah program unggulan Kabupaten Bogor, yaitu satu milyar satu desa (samisade). Hal tersebut memberikan tuntutan terhadap efektivitas sistem informasi keuangan desa yang tinggi agar kualitas laporan keuangan tetap terjaga.

2.2 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode yang digunakan pada penelitian kualitatif merupakan metode induktif. Dalam metode kualitatif dipercayai bahwa terdapat banyak sudut pandang yang dapat diungkapkan dan dalam penelitian ini identifikasi masalah mengarah kepada suatu eksplorasi yang mendalam atas suatu fenomena sentral [5]. Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang berlandaskan pada paradigma *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada obyek yang memiliki kondisi alamiah.

2.3 Sumber Data

Berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti melalui sumber pertama. Sementara itu data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti melalui sumber yang telah tersedia sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Dimana data primer diperoleh melalui

wawancara secara langsung dengan informan, yaitu sekretaris desa, kaur keuangan, dan kaur perencanaan Desa Cijujung. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui sumber-sumber yang relevan dengan tujuan penelitian seperti arsip-arsip atau buku-buku ilmiah.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data merupakan sebuah proses penting. Berikut ini metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data:

2.4.1 Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh informasi untuk tujuan penelitian, melalui proses tanya jawab secara bertatap muka antara narasumber dan pewawancara, dengan atau tanpa pedoman wawancara [6]. Secara umum proses wawancara melalui enam tahapan, yaitu:

- a) mengidentifikasi masalah penelitian atau fenomena yang akan diteliti.
- b) mengembangkan pola wawancara seperti pertanyaan penelitian.
- c) melakukan wawancara terhadap narasumber
- d) melakukan proses transkripsi, yaitu proses mengubah suara atau percakapan ke dalam bentuk tulisan
- e) menganalisis hasil wawancara
- f) pelaporan

Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara secara semi-terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih mendalam. Dimana, narasumber akan diminta untuk mengklarifikasi hal-hal yang berkaitan dengan Siskeudes.

2.4.2 Dokumentasi

Hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara akan lebih kredibel jika didukung oleh foto atau gambar yang mencerminkan keadaan aslinya.

2.5 Teknik Keabsahan Data

Tujuan dari teknik keabsahan data adalah untuk menyatakan bahwa data penelitian yang akan diteiti dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik keabsahan data berupa triangulasi. Nilai dari teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh meluas, tidak konsisten atau kontradiksi [7]. Teknik keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi teknik dan sumber. Dimana pada triangulasi teknik peneliti akan memperoleh informasi melalui wawancara dengan narasumber dan juga dokumentasi atas bukti yang diperlukan. Sementara itu, pada triangulasi sumber, peneliti akan mewawancarai narasumber yang mengoperasikan siskeudes yaitu sekretaris desa, kaur keuangan, dan kaur perencanaan.

2.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data penyajian data dan Kesimpulan.

- 1) Pengumpulan data
Pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi yang kemudian akan dianalisis oleh peneliti.
- 2) Reduksi data
Reduksi data memiliki makna bahwa data yang diperoleh peneliti melalui hasil wawancara akan dipilih dan difokuskan pada informasi yang paling penting.
- 3) Penyajian data

Data yang diperoleh dengan teknik wawancara, akan ditarik kesimpulan untuk menyajikan gambaran mendalam tentang beberapa kasus yang ada di Kabupaten Bogor.

4) Kesimpulan

Kesimpulan adalah temuan hasil penelitian yang berisi ringkasan utama penelitian yang telah melalui analisis data.

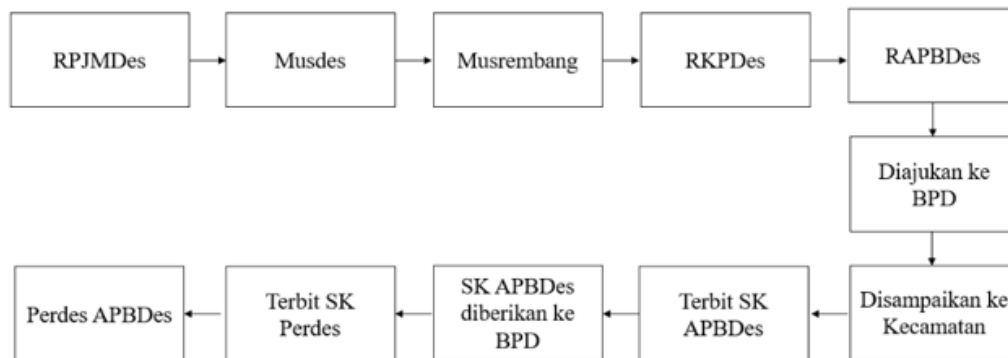
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Data

3.1.1 Penerapan Siskeudes pada Desa Cijujung bila ditinjau dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

a. Perencanaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan kaur perencanaan dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyusunan RAPBDes dilakukan pembahasan terlebih dahulu antara kades, sekdes dan perencanaan. Kemudian disampaikan kepada BPD dan juga kecamatan untuk dilakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum terbit perdes APBDes.

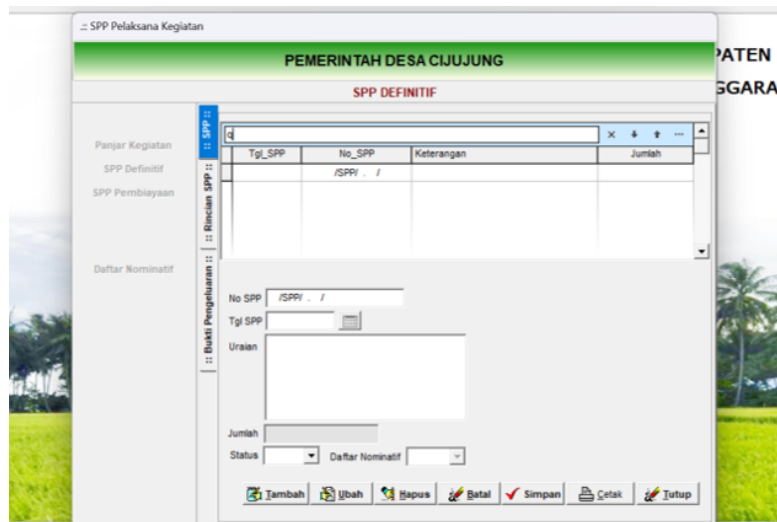


Gambar 1. Alur APBDes

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2026)

b. Pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan kaur keuangan, diperoleh informasi bahwa pelaksanaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa, yaitu dengan menggunakan rekening Bank BJB. Rekening kas desa dibuat oleh kaur keuangan dan disetujui atau ditandatangani oleh kaur keuangan dan juga kepala desa. Pada tahap pelaksanaan, peneliti memperoleh sumber data sekunder yaitu dokumentasi dari pengisian SPP pada siskeudes.



Gambar 2. Tampilan Pengisian SPP Pada Siskeudes
Sumber: Siskeudes Desa Cijujung, 2026

c. Penatausahaan

Berdasarkan pernyataan kaur keuangan tersebut diketahui bahwa pada tahap penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh kaur keuangan. Beliau menyatakan bahwa setiap pemasukan dan pengeluaran desa dicatat dalam siskeudes. Selain itu beliau turut menyatakan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh Desa Cijujung sudah menggunakan Bank BJB dan sebagian besar transaksi dilakukan secara non-tunai.

d. Pelaporan

Berdasarkan keterangan dari narasumber dapat disimpulkan bahwa untuk mengoperasikan siskeudes pada tahap pelaporan relatif mudah. Karena seluruh transaksi yang tercatat didalam Siskeudes telah terintegrasi. Sehingga laporan realisasi APBDes dapat dihasilkan secara otomatis melalui siskeudes dengan memilih menu laporan, kemudian pilih pertanggungjawaban, kemudian pilih laporan realisasi APBDes.

e. Pertanggungjawaban

Pada tahap pertanggungjawaban, peneliti memperoleh informasi dari kaur keuangan. Beliau mengatakan bahwa pada tahap pertanggungjawaban terkait laporan pertanggungjawaban apa saja yang wajib disampaikan kepada bupati/walikota, yaitu laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPD), sementara selain memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan kepada bupati/walikota, pemerintah desa juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa (LKPPD). Selain itu pemerintah desa juga turut menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui baliho atau sosial media.

2) Penerapan Siskeudes dalam mengelola keuangan desa ditinjau dari tahap produktivitas, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, keunggulan, dan perkembangan.

a. Produktivitas

Pada hal ini peneliti memperoleh informasi melalui wawancara dengan kaur keuangan. Beliau mengatakan kepada peneliti terkait informasi mengenai dokumen apa saja yang disusun dengan menggunakan siskeudes. peneliti memperoleh informasi dari kaur keuangan

bahwa semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh Desa Cijujung telah dicatat dengan menggunakan siskeudes, seperti buku pembantu bank, pajak, dan lain sebagainya. Sudah tidak ada lagi proses penatausahaan keuangan yang dilaksanakan secara manual.

b. Kualitas

Dalam hal ini, peneliti memperoleh informasi dari kaur keuangan tentang penggunaan siskeudes. Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari kaur keuangan, beliau mengatakan bahwa siskeudes mudah untuk digunakan. Meski seringkali terdapat kendala seperti sistem yang upgrade hingga tidak dapat digunakan.

c. Efisiensi

Sebagaimana yang dinyatakan oleh kaur keuangan bahwa penyusunan laporan keuangan dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dan mudah dengan menggunakan siskeudes.

d. Fleksibilitas

Fleksibilitas diambil dari kata fleksibel yang berarti mudah menyesuaikan. Dalam hal ini fleksibilitas yang dimaksud adalah kemampuan siskeudes dalam mempermudah aparat Desa Cijujung dalam mencatat atau mendokumentasikan transaksi harian. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan wawancara kepada kaur keuangan terkait kemudahan aparat desa dalam mengidentifikasi transaksi harian di siskeudes. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengoperasian siskeudes di desa Cijujung mudah disesuaikan sesuai dengan transaksi atau kebutuhan aparat Desa Cijujung.

e. Kepuasan

Dalam hal ini kepuasan dapat didefinisikan bahwa harapan atas pengaplikasian sistem keuangan desa sudah dicapai sehingga dapat memenuhi kebutuhan aparat desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan kaur keuangan. Untuk melihat penerapan dari indikator kepuasan peneliti melakukan wawancara berdasarkan dari indikator sebagai berikut kepada kaur keuangan:

1. *Performance* (kinerja)

Aspek kinerja ditinjau berdasarkan kepuasan pengguna terhadap kecepatan pemrosesan data oleh Siskeudes. Berikut keterangan yang peneliti peroleh melalui kaur keuangan:

“Kalau untuk kepuasan sih ya sejauh ini kita puas. Meski memang ada kendala seperti sistemnya suka ngefreeze kalau akhir taun. Tapi kita ga pernah telat ngumpulin LPJ ke kecamatan, karena kan udah ada jadwal-jadwal nya.”

2. *Information* (Informasi)

Pada hal ini peneliti memperoleh hasil wawancara dengan narasumber yaitu kaur keuangan sebagai berikut:

“Ya, laporan pertanggungjawaban yang dihasilkan oleh siskeudes memiliki format yang mudah dibaca. Terus formatnya juga sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku.”

3. *Economics* (Ekonomi)

Dalam hal ini peneliti memperoleh informasi dari kaur keuangan tentang penggunaan siskeudes bila dinilai dari unsur ekonomi, yaitu berupa efisiensi biaya. Informan menuturkan bahwa jika dinilai dari segi ekonomi, penggunaan siskeudes dinilai tidak memberikan dampak signifikan terhadap biaya penggunaan kertas. Hal tersebut terjadi karena LPJ yang telah selesai diinput dalam siskeudes harus dicetak untuk kemudian ditandatangani oleh kepala desa dan camat.

4. *Control* (Kendali)

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada aparat desa yang menuturkan bahwa yang memiliki akses untuk menggunakan siskeudes adalah kades, sekdes, dan kaur keuangan.

5. *Efficiency* (Efisiensi)

Efisiensi merupakan aspek yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu sistem dalam menghasilkan output secara optimal dengan usaha yang minimum. Dalam hal ini peneliti memperoleh informasi dari narasumber mengenai efisiensi penggunaan siskeudes. Dalam hal ini narasumber memberikan penjelasan bahwa penggunaan siskeudes telah memberikan kemudahan bagi aparat desa dalam menghasilkan laporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Beliau juga turut menambahkan bahwa fitur-fitur yang ada di siskeudes mudah untuk dipahami dan digunakan oleh informan selaku kaur keuangan.

6. *Services* (Pelayanan)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yaitu selaku kaur keuangan dan sekretaris desa, beliau mengatakan bahwa pelayanan atau bantuan sangat mudah untuk diakses. Apabila terjadi kendala, user atau kaur keuangan akan melaporkan kepada DPMD melalui whatsapp grup gabungan bendahara atau kaur keuangan kecamatan Sukaraja untuk kemudian akan diberikan arahan.

f. Keunggulan

Keunggulan dapat didefinisikan sebagai kelebihan yang dimiliki oleh seseorang, produk, atau organisasi dalam suatu bidang. Dalam hal ini keunggulan didefinisikan sebagai kelebihan atau keuntungan yang dirasakan dalam menggunakan sistem informasi. Dalam hal ini, kaur keuangan menjelaskan bahwa selain keunggulan berupa kemudahan dan kecepatan dalam melakukan penyusunan laporan keuangan, tidak ada keunggulan materiil yang dirasakan. Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan siskeudes memberikan keunggulan berupa peningkatan kinerja aparat Desa.

g. Perkembangan

Perkembangan dapat didefinisikan sebagai perubahan kearah yang lebih baik. Dalam hal ini, perkembangan didefinisikan sebagai perubahan pengelolaan setelah menggunakan siskeudes. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa penggunaan siskeudes memberikan pengaruh yang sangat positif bagi aparat desa dalam mengelola laporannya, yaitu pengelolaan keuangan desa menjadi lebih cepat dan format laporan keuangan yang dihasilkan oleh siskeudes secara otomatis sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kaur keuangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan siskeudes telah efektif dalam proses pengelolaan keuangan Desa Cijujung. Dengan menggunakan siskeudes, laporan keuangan dapat disusun dengan lebih cepat dan format yang dihasilkan telah sesuai dengan format laporan realisasi APBDes yang tercantum dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018.

3) Identifikasi faktor pendukung dan penghambat penggunaan siskeudes dalam mendukung kualitas laporan keuangan.

Faktor pendukung dalam menggunakan siskeudes didukung oleh sistem informasi keuangan yang telah terintegrasi. Sehingga penyusunan laporan keuangan mudah untuk

dilakukan. Selain itu kemudahan dalam menggunakan siskeudes didukung oleh bimbingan teknis (bimtek) yang dilaksanakan oleh DPMD sehingga dengan demikian penyusunan laporan keuangan dan pencatatan transaksi harian tetap bisa berjalan dengan optimal, ketersediaan sarana dan prasarana seperti komputer dan jaringan internet yang memadai. Sementara itu penghambat dalam penggunaan siskeudes adalah adanya *upgrade* sistem secara berkala pada siskeudes, dimana hal tersebut dapat menghambat proses kerja, dan kemampuan SDM yang kurang memadai sehingga semua pencatatan keuangan hanya mengandalkan kaur keuangan.

3.2 Pembahasan Data

3.2.1 Penerapan siskeudes pada Desa Cijujung dalam siklus pengelolaan laporan keuangan desa ditinjau dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

a. Perencanaan

Pada tahap perencanaan, langkah pertama yang dilakukan setelah kepala desa (kades) terpilih melalui pemilu adalah pembentukan panitia kecil dengan kepala desa bertindak sebagai pembina dan sekretaris desa sebagai ketua dari panitia tersebut. Panitia tersebut beranggotakan perangkat desa, kader pemberdayaan masyarakat, perwakilan PKK, karang taruna, dan unsur masyarakat lain. Panitia tersebut berfungsi untuk membahas dan menyepakati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) selama 8 tahun. Selanjutnya akan dilaksanakan musyawarah desa (musdes) untuk memberikan usulan, kebutuhan, dan prioritas pembangunan. Setelah itu, rancangan RPJMDes kembali dibahas dalam musrembang. Pembahasan tersebut dilakukan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) untuk jangka waktu satu tahun. Dalam hal ini RKPDDes disusun berdasarkan RPJMDes. Setelah itu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDDes) disusun sesuai dengan RKP Desa.

Kemudian RAPBDDes diajukan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dievaluasi. Setelah evaluasi oleh BPD selesai, selanjutnya RAPBDDes disampaikan ke Kecamatan untuk dievaluasi. Setelah itu terbit SK APBDDes. SK APBDDes kemudian diserahkan kepada BPD, hingga turun SK Perdes dan kemudian menjadi Perdes APBDDes. Kemudian dokumen-dokumen tersebut diinput ke dalam siskeudes, beserta dengan angka-angka nominal-nominal APBDDes.

Berdasarkan penjabaran diatas, dapat diketahui bahwa pada tahap perencanaan yang terdiri dari penyusunan perencanaan RPJMDes, RKPDDes, dan APBDDes, Siskeudes telah digunakan untuk menyusun dokumen-dokumen tersebut. Data-data mengenai program kerja, kegiatan, subkegiatan, dan anggaran dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pada tahap perencanaan siskeudes memberikan kemudahan bagi aparat desa dalam mendeteksi keterkaitan antara program, kegiatan, dan anggaran yang telah ditetapkan.

b. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, uang masuk dan uang keluar pemerintah desa dilakukan dengan menggunakan rekening kas desa yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala desa dan kaur keuangan. Rekening yang digunakan adalah rekening Bank BJB. Setelah rekening siap, kepala desa memberi tugas kepada para kepala urusan (kaur) dan kepala seksi (kasi) untuk melakukan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) untuk melakukan penginputan mengenai rincian kegiatan yang berisi volume, biaya, jenis kegiatannya, waktu pelaksana, tim pelaksana harga dan total harga, hal tersebut sesuai dengan perdes APBDDes dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDDes yang telah ditetapkan. Apabila suatu kegiatan ingin dilaksanakan,

penanggungjawab kegiatan harus melakukan pengajuan pencairan dana terlebih dahulu dengan menyampaikan SPP. Setelah SPP dikonfirmasi dan disetujui oleh kades, setelah itu akan dicairkan melalui bendahara desa/kaur keuangan. Kemudian kaur keuangan akan menginput ke dalam siskeudes.

Siskeudes memberikan batasan terhadap penggunaan kode rekening untuk mengurangi risiko penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukannya. Transaksi yang dilaksanakan hendaknya memiliki dasar yang jelas dan dokumen pendukung dapat ditelusuri kembali. Sehingga, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa siskeudes dapat digunakan untuk membantu pemerintah desa dalam memastikan bahwa pengeluaran dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

c. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh kaur keuangan. Beliau menyatakan bahwa setiap pemasukan dan pengeluaran desa dicatat dalam siskeudes berdasarkan bukti transaksi yang sah. Setiap transaksi yang dilakukan oleh Desa Cijujung sudah menggunakan Bank BJB dan sebagian besar transaksi dilakukan secara non-tunai. Tahap penatausahaan merupakan tahapan yang paling krusial, pada tahap inilah kualitas laporan keuangan ditentukan karena seluruh informasi keuangan berasal dari tahap pencatatan transaksi. Laporan keuangan yang telah terintegrasi memungkinkan setiap transaksi cukup dicatat satu kali, kemudian secara otomatis akan memperbarui data pada buku kas umum, buku bank, buku pajak, dan lainnya. Hal tersebut dapat meminimalisir risiko kesalahan pencatatan. Sehingga informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi lebih mudah diverifikasi.

d. Pelaporan

Dalam hal pelaporan keuangan desa, kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi dan laporan pelaksanaan APBDes melalui camat kepada Bupati/walikota. Laporan APBDes akan disampaikan setiap semester dan setiap tahun. Setiap semester, laporan realisasi dan laporan pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati/Walikota selambat-lambatnya bulan Juli. Sementara itu, laporan pertanggungjawaban akhir tahun disampaikan selambat-lambatnya pada bulan Maret tahun berikutnya.

e. Pertanggungjawaban

Pada akhir tahun anggaran, pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan akhir tahun kepada bupati/walikota dan BPD. Laporan keuangan yang disampaikan kepada bupati/walikota ialah laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPD). Sementara laporan yang wajib disampaikan kepada BPD adalah laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa (LKPPD). Laporan keuangan akhir tahun tersebut disampaikan kepada selambat-lambatnya pada bulan Maret tahun berikutnya. Sementara itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, pemerintah desa juga turut menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada masyarakat melalui baliho dan media sosial sebagai bentuk transparansi terkait penggunaan dana desa kepada masyarakat.

3.1.2 Analisis penerapan efektivitas penggunaan siskeudes di Desa Cijujung berdasarkan indikator produktivitas, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, keunggulan, dan perkembangan.

Tabel 1. Penerapan Indikator Efektivitas

Tahapan	Bentuk Penerapan
Produktivitas	Seluruh pencatatan transaksi keuangan dilakukan dengan menggunakan siskeudes
Kualitas	Siskeudes mudah digunakan untuk melakukan penginputan dokumen, meskipun sistem sering mengalami <i>freeze</i> .
Efisiensi	Siskeudes memberikan kemudahan bagi aparat desa dalam melakukan penyusunan laporan keuangan secara cepat karena laporan keuangan telah terintegrasi.
Fleksibilitas	Identifikasi transaksi mudah untuk dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
Kepuasan	Aparat desa merasa cukup puas menyusun laporan keuangan dengan menggunakan siskeudes
Keunggulan	Kinerja aparat desa menjadi lebih baik, namun hal tersebut tidak berimplikasi terhadap peningkatan anggaran yang diterima oleh pemerintah desa.
Perkembangan	Semenjak menggunakan siskeudes, seluruh transaksi keuangan menjadi terintegrasi, sehingga administrasi menjadi lebih rapih.

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

f. Produktivitas

Secara umum produktivitas dapat didefinisikan sebagai kemampuan sumber daya untuk menghasilkan sesuatu (output). Dalam hal ini produktivitas dapat diartikan sebagai kemampuan siskeudes dalam menghasilkan seluruh laporan keuangan yang diperlukan. Menurut permendagri nomor 20 tahun 2018, dalam rangka melakukan penatausahaan laporan keuangan desa, kaur keuangan wajib menyusun buku kas umum, yang terdiri dari buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar. Dalam hal ini, semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh Desa Cijujung telah dicatat dengan menggunakan siskeudes, seperti buku pembantu bank, pajak, dan lain sebagainya. Seluruh laporan tersebut dihasilkan melalui satu kali input transaksi ke dalam sistem tanpa memerlukan pencatatan ulang.

Kemampuan siskeudes dalam menghasilkan berbagai macam output dengan satu kali input transaksi tersebut dapat mendukung aparat desa dalam meningkatkan produktivitas. Hal tersebut juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Karena laporan keuangan dihasilkan melalui basis data yang sama. Sehingga dapat meminimalisir risiko perbedaan data akibat penginputan ulang. Selain itu penyusunan laporan keuangan menjadi lebih cepat, sehingga dapat mendukung penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu.

g. Kualitas

Siskeudes diciptakan untuk memberikan kemudahan bagi aparat desa dalam melakukan tata kelola laporan keuangan yang akuntabel, tertib, dan disiplin anggaran. Siskeudes dirancang dengan sesederhana mungkin agar perangkat desa mudah menggunakannya. Dalam hal ini peneliti meninjau indikator kualitas berdasarkan kemudahan aparat desa Cijujung dalam mengakses siskeudes dan keakuratan informasi yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat desa Cijujung, beliau menyatakan bahwa Siskeudes mudah diakses dan digunakan dalam proses pengelolaan laporan keuangan desa. kemudahan akses terhadap siskeudes menunjukkan bahwa sistem dapat mendukung pelaksanaan pekerjaan secara efektif. Kondisi tersebut secara tidak langsung mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan karena mengurangi potensi kesalahan operasional.

h. Efisiensi

Efisiensi dalam penggunaan siskeudes ditinjau berdasarkan kemampuan siskeudes untuk membantu aparat desa menghemat waktu dalam menghasilkan laporan keuangan. Siskeudes dirancang untuk menghasilkan berbagai dokumen administrasi dan laporan dalam satu kali proses input transaksi. Data transaksi yang telah diinput ke dalam siskeudes akan menghasilkan berbagai macam laporan keuangan yang diperlukan seperti buku kas umum, buku bank, buku pajak, hingga laporan realisasi APBDes. Hal tersebut mendukung aparat desa dalam mengurangi risiko salah catat, menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat, dan tepat waktu.

i. Kepuasan

Dalam hal ini, kepuasan diukur berdasarkan keinginan yang ingin dicapai oleh aparatur Desa Cijujung dalam menggunakan siskeudes telah terpenuhi. Kepuasan diukur berdasarkan indikator *performance, informations, economics, control and security, efficiency, services*. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada informan dengan menggunakan keenam indikator tersebut, terdapat lima indikator yang mengindikasikan bahwa aparat desa merasa puas dengan penggunaan siskeudes sebagai sebuah sistem keuangan yaitu indikator *performances, informations, control and security, efficiency, services*. Meski demikian masih terdapat indikator yang belum terpenuhi secara optimal, yaitu *economics*. Dimana indikator tersebut ditinjau berdasarkan penghematan biaya kertas dan alat tulis. Dalam hal ini pemerintah desa masih memiliki kewajiban dalam mencetak laporan untuk memperoleh tandatangan camat secara langsung sebagai bentuk dari pengesahan dokumen. Kondisi tersebut menyebabkan biaya tinta dan kertas masih diperlukan, sehingga penghematan atau efisiensi pada biaya operasional belum dicapai secara maksimal. Sehingga, dengan demikian, ketidak tercapaian indikator economics bukan disebabkan oleh kekurangan siskeudes, namun karena adanya prosedur administrasi sebagai bentuk pengendalian internal, khususnya dalam aspek otorisasi.

j. Keunggulan

Keunggulan ditinjau berdasarkan peningkatan kinerja aparatur Desa Cijujung. Dalam hal ini, penggunaan siskeudes berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pemerintah desa terutama dalam efisiensi waktu, dimana segala pencatatan keuangan dalam siskeudes telah terintegrasi. Sehingga laporan keuangan dapat dihasilkan dengan lebih cepat dan minim kesalahan karena tidak ada pencatatan transaksi yang dilakukan secara berulang. Hal tersebut, dapat meningkatkan penyajian laporan keuangan secara lebih akurat dan lebih konsisten.

k. Perkembangan

Dalam hal ini perkembangan ditinjau berdasarkan perkembangan pengelolaan keuangan desa setelah menggunakan siskeudes, dimana hasil pemeriksaan laporan keuangan Desa merupakan tolak ukur dalam indikator ini. Berdasarkan pernyataan kaur keuangan, beliau menyatakan bahwa pengawasan terhadap keuangan Desa dilakukan secara rutin oleh inspektorat dan sejauh ini, audit formal oleh BPK, belum pernah dilaksanakan secara langsung.

3.1.3 Identifikasi faktor pendukung dan penghambat penggunaan siskeudes dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan desa.

a. Faktor Pendukung:

1) *Single-entry system* pada Siskeudes.

Dimana dalam hal ini transaksi hanya perlu diinput satu kali kemudian akan menghasilkan dokumen dan laporan keuangan yang diperlukan. Sehingga hal tersebut akan

memembuat pekerjaan menjadi lebih efisien serta meningkatkan konsistensi data antar laporan keuangan.

2) Pendampingan dan Pelatihan dari DPMD

Faktor yang mendukung aparat desa dalam mengelola keuangan dengan menggunakan siskeudes adalah pendampingan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh DPMD sehingga aparat desa dapat dengan mudah beradaptasi dengan Siskeudes versi terbaru.

3) Kompetensi pegawai

Dalam hal ini kompetensi yang dimiliki oleh SDM memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan siskeudes. Karena hal tersebut mengindikasikan bahwa SDM tersebut memiliki kapabilitas yang semakin baik dalam memahami dan mengelola keuangan desa.

b. Faktor Penghambat

1) *Upgrade software* atau pembaruan sistem

Upgrade software mengharuskan aparat desa beradaptasi dengan siskeudes versi terbaru. Selain itu pada saat instalasi software versi terbaru tersebut, menyebabkan pekerjaan pekerjaan menjadi tertunda.

2) Ketergantungan pada satu operator

Dalam hal ini, Siskeudes hanya dioperasikan oleh satu orang aparat desa saja, sehingga hal tersebut menimbulkan risiko terhadap keberlangsungan pekerjaan, apabila pegawai tersebut berhalangan hadir.

4. KESIMPULAN

Pengelolaan keuangan desa di Desa Cijujung Kabupaten Bogor yang diawali dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, telah menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes), dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang terdapat dalam permendagri nomor 20 tahun 2018.

Berdasarkan indikator efektivitas yang terdiri dari produktivitas, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, keunggulan, dan pengembangan, maka penggunaan siskeudes dalam hal pengelolaan laporan keuangan Desa Cijujung telah sesuai dengan indikator dari efektivitas tersebut.

Faktor pendukung pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan siskeudes yaitu dengan adanya pelatihan atau bimbingan teknis tentang penggunaan siskeudes, serta adanya teknisi dari DPMD yang dapat dengan mudah dihubungi untuk memberikan bantuan apabila siskeudes mengalami kendala teknis, sarana dan prasarana yang memadai, sistem keuangan yang terintegrasi sehingga memudahkan aparat desa dalam menyusun laporan keuangan. Sementara itu faktor penghambat adalah sistem yang upgrade membuat pekerjaan menjadi tertunda, kompetensi SDM yang tidak memadai sehingga pengelolaan keuangan desa hanya bergantung pada satu orang saja hal tersebut berisiko terhadap penyalahgunaan wewenang.

REFERENSI

- [1] D. Wijaya, *Akuntansi Desa*. Yogyakarta, Indonesia: Gava Media, 2018.
- [2] D. Siswanto, "Thomas Djiwandono sebut dana desa Rp608,9 triliun sukses entaskan kemiskinan," *Kontan.co.id*, Aug. 6, 2024. [Online]. Available: <https://nasional.kontan.co.id/news/thomas-djiwandono-sebut-dana-desa-rp-6089-triliun-sukses-entaskan-kemiskinan>
- [3] Y. S. Hamidah, N. R. Ratih, and M. Kusumaningarti, "Analisis penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap kualitas laporan keuangan tahun anggaran 2022 di Desa Tales Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, vol. 10, no. 10, pp. 892–904, 2024, doi: 10.5281/zenodo.11519607.

- [4] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 26th ed. Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2017.
- [5] Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers, 2010.
- [6] B. Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta, Indonesia: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- [7] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2011.
- [8] S. Agusiady, B. Suryadana, and Ricky, *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta, Indonesia: Deepublish, 2022.
- [9] A. Faizah and R. Sari, "Analisis penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan di Desa Banyudono Kecamatan Dukun," *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, vol. 5, no. 1, pp. 763–776, 2022, doi: 10.36778/jesya.v5i1.539.
- [10] A. F. Fuaddin, F. T. Y. Pratama, F. A. M. Putra, and I. Setiawan, "Analisis tingkat kepuasan pengguna sistem informasi perpustakaan dengan pendekatan PIECES Framework," *Merkurius: Jurnal Riset Sistem Informasi dan Teknik Informatika*, vol. 3, no. 1, pp. 272–282, 2025, doi: 10.61132/mercurius.v3i1.665.
- [11] E. Gurendrawati, I. G. K. A. Ulupui, H. Khairunnisa, and G. M. Zairin, *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara, 2024.
- [12] S. A. Gusasi and F. D. Lantowa, "Analisis penerapan aplikasi Siskeudes dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa di Desa Huyula," *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*, vol. 4, no. 1, pp. 15–23, 2021, doi: 10.31314/jsap.4.1.15-23.2021.
- [13] J. Hoesada, *Akuntansi Desa*. Jakarta, Indonesia: Salemba Empat, 2019.
- [14] S. Humaeroh, I. E. Jumiati, and D. Maulana, "Analisis transparansi dalam mendukung akuntabilitas realisasi dana desa pada Desa Muruy Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang tahun 2020," *Jurnal Moderat*, vol. 8, no. 1, 2022.
- [15] J. L. Gibson, J. M. Ivancevich, and J. H. Donnelly, *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses*, vol. 1. Jakarta, Indonesia: Erlangga, 1996.
- [16] M. L. Mahrus, "Nilai karakter dari tujuan pelaporan keuangan," *Artikel KLC*, Nov. 30, 2023. [Online]. Available: <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/nilai-karakter-dari-tujuan-pelaporan-keuangan-c7313dae/detail/>
- [17] R. R. L. Rawambaku, A. S. Y. Kerihi, and S. G. Tefa, "Analisis penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan," *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, vol. 1, no. 5, pp. 271–284, 2024, doi: 10.61132/jjesa.v1i5.524.
- [18] F. V. Rompas and W. D. Kindangen, "Analisis kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado," *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, vol. 6, 2022.
- [19] A. Setiawan, R. Prihatni, and D. Handarini, "Analisis pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di desa Kabupaten Bogor," *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, vol. 5, no. 3, pp. 613–625, 2024, doi: 10.21009/japa.0503.10.
- [20] O. P. Utami, E. Agustin, and N. Priyono, "Analisis penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa di Desa Karangrejo Kecamatan Selomerto," *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, vol. 1, pp. 65–75, 2023.
- [21] K. Yuneti, V. E. Gula, and W. M. Y. Jaeng, "Pengaruh kompetensi aparat desa dan penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa terhadap kualitas laporan keuangan desa," *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, vol. 3, no. 1, pp. 333–343, 2024, doi: 10.30640/inisiatif.v3i1.2139.